

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Konektivitas Antar Pulau Melalui Transportasi Laut di Tambelan

La Ode Aziz Na'im<sup>1</sup>, Muhammad Naufal<sup>2</sup>, Helen Permatasari<sup>3</sup>.

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau 29115. Indonesia

*Email: laodeaziznaim@gmail.com*

### ABSTRAK

Sarana dan prasarana transportasi laut yang minim menimbulkan kendala dalam penyaluran arus barang dan orang, serta pembangunan yang harus digenjut di Pulau Kecamatan Tambelan pada akhirnya akan menurunkan konektivitas antarpulau. Ketersediaan transportasi laut sangat dibutuhkan untuk konektivitas antarpulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan Kecamatan Tambelan. Dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut akan meningkatkan jangkauan antarpulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau serta ketersediaan layanan transportasi laut yang terorganisasi dengan baik. Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif agar dapat menganalisis dan mengetahui kondisi faktual terkait konektivitas transportasi antarpulau khususnya pulau terpencil di Kecamatan Tambelan serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terkait hal tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam peningkatan konektivitas antar pulau kecil di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan tentunya diperlukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan kapal perintis dan pelabuhan menjadi kunci penting dalam konektivitas antar pulau di Kecamatan Tambelan serta sarana dan prasarana serta distribusi barang dan manusia akan menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan pulau-pulau di dalam wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Pembangunan prasarana kelautan dan infrastruktur transportasi laut akan menjamin kebutuhan masyarakat Kecamatan Tambelan terpenuhi dan tidak lagi terlalu bergantung pada pulau besar.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Konektivitas, Infrastruktur, Kesejahteraan.

### PENDAHULUAN

Sebesar 70 persen Luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan dan sisanya adalah wilayah daratan. Luas laut Indonesia kurang lebih 3.257.483 km<sup>2</sup> atau dapat dibandingkan  $\frac{3}{4}$  dari wilayah daratan. Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, yang mempunyai cukup banyak pulau-pulau kecil sejumlah 2.408 pulau. Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar maka dapat diklasifikasikan berdasarkan kepenghuniannya antara lain; pulau

terpengeruni sejumlah 366 pulau, pulau tidak terpenghuni sejumlah 2.402 pulau, dan pulau terdepan sejumlah 52 pulau, serta pulau paling luar sejumlah 19 pulau (Kusnita et al., 2021).

Pendefinisian pulau kecil didasarkan pada kriteria utamanya yaitu luas pulau dan jumlah masyarakat yang ada. Secara nasional berdasarkan sesuai Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 mendefinisikan pulau-pulau kecil merupakan pulau yang memiliki ukuran

kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup>, dengan memiliki populasi penghuni kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Bersamaan syarat tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil merupakan berhubungan dengan antar masyarakat yang terpisah dari pulau besarnya (*mainland island*).

Apabila kita membahas permasalahan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang menduduki pulau-pulau kecil tentu saja kesejahteraannya tidak sama dengan pulau besar disekitarnya. Secara letak wilayahnya antar pulau terpencil akan mengakibatkan kemunculan perbedaan ditengah-tengah pertumbuhan sosial ekonomi pada akhirnya yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah persebaran penduduk adalah pulau-pulau besar terhadap pulau terpencil di sekitarnya.

Di samping itu, Sulitnya pengaksesan perhubungan dan penjangkauan terhadap pulau-pulau kecil dikarenakan oleh faktor geografis yang jauh dan terisolir pada pulau besar atau pulau induk. Minimnya batasan terhadap sarana dan prasarana pelabuhan, transportasi kapal laut, rumah sakit, jalanan, sekolah, pasar, listrik, media informasi dan komunikasi mengakibatkan angka pendidikan (kualitas SDM) menurun, menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau, Tingkat kesehatan, serta tingkat konektivitas transportasi yang digunakan masyarakat antar pulau tidak memadai (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia).

Secara letak geografis kepulauan riau adalah daerah yang strategis, Terutama jalur lalu lintas laut. Dengan jumlah pulau yang banyak dan tersebar di Kepulauan Riau (Kepri) menciptakan akses jalur transportasi laut selalu ramai dan sangat pesat. Dimana rute transportasi laut antar daerah kedaerah yang lain merupakan faktor utama daerah

Kepulauan agar bisa saling berhubungan dalam kegiatan perdagangan, kebutuhan pokok, Pariwisata dan lain-lain. Terkait hal ini, Konektivitas terhadap transportasi laut sangat dibutuhkan dalam hubungan antar pulau. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2008 mendeskripsikan bahwa transportasi pelayaran laut dikelompokkan atas beberapa angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, adalah bentuk-bentuk dari sistem transportasi nasional sehingga pengelolaannya harus dilakukan menimbang peranan dan potensinya dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta mengembangkan pola distribusi nasional secara pesat yang berkualitas dan dinamis (Pemerintah RI, 2008).

Minimnya sarana dan prasarana transportasi laut memunculkan hambatan pada pendistribusian arus barang dan orang, serta pemerataan pembangunan di pulau tersebut pada akhirnya akan mengurangi konektivitas antar pulau. Kebutuhan angkutan laut sangat dibutuhkan menghubungkan pulau-pulau terpencil di wilayah kepulauan riau khususnya di daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Tambelan. Dengan Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut akan meningkatkan aksesibilitas antar pulau-pulau yang terpencil di Provinsi Kepulauan Riau dan tersusunnya konsep peningkatan pelayanan angkutan laut (Himawan & Susanto, 2014).

Jaringan transportasi laut di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yang ada saat ini, baru menghubungkan antar Ibu kota Kecamatan dan Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi. Oleh sebab itu, mengingat kondisi geografis yang merupakan pulau-pulau sangat diperlukan pelayanan angkutan laut perintis yang dapat

menghubungkan sampai pada tingkat antar desa dan desa dengan Ibukota Kecamatan dalam jadwal layanan yang reguler dan tarif yang terjangkau. Dalam hal ini, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau maupun Kabupaten Bintan sangat penting dalam hal memberikan layanan angkutan laut perintis melalui pemberian Public Service Obligation, tentunya dengan kapasitas kapal yang kecil disesuaikan dengan perkiraan jumlah penumpang yang ada.

Dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Kecamatan Tambelan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan membuat Kebijakan penetapan biaya subsidi Angkutan Laut untuk Rute Tanjungpinang-Tambelan dan Tambelan-Tanjungpinang dari tahun 2014 hingga tahun 2015 telah terjalan sesuai Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 433 / IX / 2015 Tentang Penetapan Biaya Subsidi Angkutan Laut Kabupaten Bintan Untuk Rute Tanjungpinang-Tambelan dan Peraturan Bupati Bintan Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan pemberian belanja subsidi angkutan laut Pemerintah Kabupaten Bintan.

Jauh sebelum dari adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait peningkatan pelayanan transportasi laut, konektivitas antar pulau melalui transportasi laut di Tambelan masyarakat umumnya hanya menaiki kapal perintis yang memakan waktu lima belas hari di perjalanan. Kapal tersebut masuk di kawasan Kecamatan tambelan dalam satu bulan hanya dua kali singgah dikecamatan Tambelan karna kurangnya konektivitas antar pulau melalui transportasi laut masyarakat Tambelan biasanya menggunakan kapal terigas atau kapal ikan yang bermuatan sangat sedikit. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan

memberikan penetapan Biaya Subsidi Angkutan Laut untuk Rute Tanjungpinang-Tambelan dan Tambelan-Tanjungpinang diwujudkan agar menciptakan pelayanan jasa angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan laut pada waktu tertentu dengan biaya terjangkau tanpa membebani masyarakat kecamatan Tambelan (Kecamatan et al., 2017)

Secara lebih khusus, adapun yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan top-down. Teori ini menekankan pada peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, kemudian diterapkan oleh para pelaksana kebijakan. Teori ini menganggap bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengarahkan dan mengendalikan proses implementasi kebijakan. Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan terkait konektivitas anatr pulau di Tambelan melalui transportasi laut, maka teori ini digunakan untuk menekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan mengevaluasi apakah kebijakan yang telah ditetapkan telah diimplementasikan dengan efektif atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif merupakan metode yang memerlukan pemahaman dan analisis makna antara beberapa individu dan suatu kelompok dengan subyek yang dijelaskan dalam penelitian ini. Terkait penelitian ini penulis mencari informasi dalam setiap

informan yang berpartisipasi dan terlibat dalam fenomena yang penulis teliti. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif terkait teknik analisis Penelitian yang dilakukan peneliti dimana informasi didapatkan berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh respon dari survei dilakukanlah teknik wawancara dalam mendapatkan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Agar menghasilkan penelitian yang akurat penulis menggunakan teknik analisis data yaitu tahap inferensial materi, dalam hal ini inti sari dari hasil wawancara secara sistematis dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan singkat tetapi memiliki makna yang luas. Dari hasil data tersebut dapat menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Selain menggunakan data empiris penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data teoritis. studi pustaka atau mempelajari literatur-literatur dengan mengambil data teoritis yang digunakan dan relevan untuk membangun landasan teori yang kuat agar mendukung analisis yang digunakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam meningkatkan konektivitas antar pulau kecil di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan tentunya diperlukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan kapal perintis dan pelabuhan merupakan kunci utama yang penting dalam konektivitas antar pulau-pulau di Kecamatan Tambelan serta sarana dan prasarana maupun pendistribusian barang dan orang akan mengarah ke lebih baik. Hal tersebut tentu akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan pulau-pulau yang terisolasi dalam lingkup Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Pembangunan

infrastruktur laut dan sarana prasarana transportasi laut akan akan menjamin kebutuhan masyarakat Kecamatan Tambelan terpenuhi dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pulau besar. Kebutuhan kebutuhan yang dimaksud dapat berupa sandang, pangan dan papan untuk kesejahteraan masyarakat penghuni pulau-pulau kecil tersebut adanya keberadaan transportasi dibutuhkan guna memperlancar terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat kecamatan tambelan, ketersediaan transportasi laut berupa kapal pelni dan Roro pada pendistribusian arus barang dan orang memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang muncul terkait fenomena tersebut antara lain yaitu kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut di kecamatan tambelan, konektivitas transportasi laut antar pulau di kecamatan tambelan kurang efektif, serta waktu perjalanan dari pulau kecamatan tambelan Kota Tanjungpinang atau Kabupaten Bintan untuk menyebrang memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Binran untuk membuat kebijakan terhadap fenomena tersebut bersamaan dengan partisipasi masyarakat yang juga sebagai aktor kebijakan.

Dalam menggunakan jasa transportasi laut baik kapal pelni maupun kapal Roro masyarakat kecamatan tambelan harus memakan waktu lama dalam jarak tempuh penyebrangan ke kota atau kabupaten yang di tuju. Dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat kecamatan tambelan, pada saat mereka menaiki kapal Roro ke daerah tujuan memakan waktu 16-18 jam

sedangkan kapal pelni memakan waktu 21-24 jam. Disamping itu ditemukan juga permasalahan lain berupa setiap transportasi laut baik kapal pelni maupun Roro tidak bersandar ke pelabuhan Kecamatan Pulau Tambelan setia harinya, melainkan seminggu sekali bahkan lebih. Hal tersebut merupakan salah satu yang membuat lemahnya konektivitas antar pulau di Kecamatan Tambelan terhadap pendistribusian arus barang dan orang.

Terkait kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan pelayanan publik dari segi sarana dan prasarana transportasi laut antar pulau di Kecamatan Tambelan, kurangnya partisipasi masyarakat didalam perumusan kebijakan tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat Kecamatan Tambelan yang turut berpartisipasi sehingga peningkatan konektivitas transportasi laut di daerah tersebut kurang kuat dari segi jasa transportasi lautnya. Dari Partisipasi sebagian kecil masyarakat tersebut Pemerintah daerah membuat kebijakan fasilitas transportasi laut gratis setahun sekali pada saat mudik lebaran saja.

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari total 2.408 pulau besar dan kecil, 30% di antaranya tidak bernama dan tidak berpenghuni. Memiliki luas 252.601 km<sup>2</sup>, sekitar 95% berupa laut dan hanya sekitar 5% berupa daratan. Secara total wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 wilayah administrasi dan 2 kota, 47 kecamatan dan 274 kecamatan/desa. Hambatan geografis, demografis, dan maritim membuat eksploitasi sumber daya alam yang tersebar di pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, yang mengakibatkan keterbelakangan, isolasi atau keterpencilan dibandingkan

dengan pulau-pulau lain yang lebih mudah diakses. Menggunakan analisis tingkat akses untuk memecahkan masalah. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya perubahan tingkat pergaulan. Hanya ada 21 pelabuhan di Kepulauan Riau yang terakreditasi untuk lalu lintas penumpang, perintis, dan penyeberangan. Selain itu, kapal kargo mendapatkan sedikit karena belum layak secara ekonomi (Sinaga et al., 2020).

Berdasarkan pada visi dan misi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil yaitu "Terwujudnya Pemanfaatan dan Pelestarian Pulau-pulau Kecil bagi Kesejahteraan, Keamanan Masyarakat dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Mengacu pada Visi tersebut pemerintah pusat membuat beberapa kebijakan salah satunya melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Terdapat beberapa faktor kendala terkait pengelolaan pulau-pulau kecil salah satunya yaitu masih sedikitnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi seperti kapal reguler, ketersediaan tambatan/dermaga, mercu suar dalam rangka untuk keselamatan pelayaran, listrik, air bersih dan lain lain. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Daerah terkait penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sangat diharapkan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil).

Keberadaan pulau Tambelan cukup terpencil, berjarak kurang lebih 300 mil laut

dari sisi timur Pulau Bintan. Dengan demikian, Tambelan termasuk dalam sub-wilayah Tertinggal, Terluar, Pinggiran dan Perbatasan (3TP). Datang ke kawasan 3TP Kecamatan Tambelan memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan dengan beberapa pulau yang sedikit lebih dekat dengan Pulau Bintan sebagai ibu kota kabupaten. Karena keberadaan pulau terpencil ini, pelayanan, pembangunan fisik dan sumber daya manusia menjadi kendala. Akselerasi konektivitas mulai terlihat dari peran Pelni dalam melayani transportasi, mulai penumpang, logistik, dan barang lainnya. Beberapa peristiwa yang akan dikenang selamanya di Kepulauan Riau tidak terlepas dari peran zona Nusantara. Pernah pada tahun 2018, Tambelan mengalami banjir bandang yang merendam hampir seluruh pemukiman masyarakat. Pascabencana, pemerintah setempat memberikan bantuan besar-besaran dengan menggunakan KM sabuk Nusantara 39. Selain Sanus 39, KM Sanus 48 juga menjadi misi kemanusiaan, bantuan medis dan satgas penanggulangan bencana kepolisian, yang meliputi dokter dan bidang kesehatan. (Biddokkes), Polda Kepri, psikolog dan ahli struktur untuk pemugaran. Ladang Tembeleni pasca banjir kedua tahun 2019 (Antarakepri, 2021)

Armada Pelni juga berperan penting dalam peristiwa paling bersejarah bagi masyarakat wilayah Tambelan, Kabupaten Bintan itu. Yaitu kasus dimana pola kelistrikan berubah dari 12 jam menjadi 24 jam. Berkat kapasitas muatnya yang besar, kapal Pelni aman melewati Laut China Selatan yang membawa beberapa komponen kelistrikan seperti tiang, kabel, gardu induk, yang mulai 28/10/2019 Tambelan akan mendapat layanan listrik 24 jam. PT Pelni

(Persero) dikabarkan kini mengoperasikan tidak kurang dari 26 kapal pesiar dan mengunjungi 83 pelabuhan serta melayani 1.100 ruas. Selain angkutan laut penumpang, Pelni juga dilayani oleh 45 jalur pelayaran perintis yang memungkinkan warga beraktivitas di wilayah 3TP, yang memiliki kapal perintis di 275 pelabuhan di 3.739 divisi dan mengoperasikan sebanyak 20 kapal Rede. Selain layanan logistik, Pelni juga mengoperasikan 4 kapal kargo, 8 kapal tol laut, dan 1 kapal ternak. Kehadiran kapal Pelni memberi harapan baru bagi masyarakat pulau kecil seperti Tembelen, Kabupaten Bintan. Pulau yang disebut-sebut memiliki banyak keterbatasan itu, kini berangsur membaik 180 derajat. Dengan perbaikan dan keberhasilan yang dilakukan Pelni, bisa mengubah paradigma masyarakat Kepri terhadap kapal perintis sebagai transportasi laut (Syafri KA & Sujarwanto, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan (policy implementation analysis), merupakan pendekatan teoritis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu kebijakan publik diterapkan dalam praktik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Secara lebih khusus, adapun yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan top-down. Teori ini menekankan pada peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, kemudian diterapkan oleh para pelaksana kebijakan. Teori ini menganggap bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengarahkan dan mengendalikan proses

implementasi kebijakan. Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan terkait konektivitas sarana dan prasarana transportasi laut antar pulau, maka teori ini digunakan untuk menekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan mengevaluasi apakah kebijakan yang telah ditetapkan telah diimplementasikan dengan efektif atau tidak (Yunnisa Tessa, 2022).

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan membuat kebijakan terkait konektivitas Antar Pulau Melalui Transportasi Laut di Tambelan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan hal tersebut ialah memperkenalkan wilayah kecamatan Tambelan kepada para investor. Dengan kondisi geografis Tambelan dan sumber daya laut yang beragam seperti perikanan dan budidaya terumbu karang yang cukup luas. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih dari situlah pemerintah kabupaten bintan membuat kebijakan meningkatkan transportasi laut antar pulau di Tambelan melalui para investor (Rusfiana, 2022).

Disamping itu perlunya mencari investor di Jasa kelautan Kabupaten Bintan adalah salah satu sektor yang mendorong sarana prasarana konektivitas transportasi laut di pulau-pulau Kecamatan Tambelan, seperti jasa pelayanan pelabuhan, jasa

pelayanan keselamatan pelayaran dan kegiatan yang memanfaatkan kelautan sebagai jasa seperti perdagangan, pendidikan, pelatihan. Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mengamati keadaan sekitar tidak hanya jasa kelautannya saja tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau Kecamatan Tambelan. Dalam menerapkan kebijakan terkait memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah Kabupaten Bintan perlu menerapkan jasa-jasa lainnya seperti jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengolahan limbah secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Di bidang pengembangan sumberdaya manusia khususnya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan guna menghasilkan tenaga yang terampil dalam melaksanakan pembangunan pembangunan kelautan di dalam maupun luar negeri, diantaranya dalam rangka mengisi peluang kebutuhan tenaga kepelautan (seafarer) (Poti, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ronaldy Lovina pada tahun 2022 kunci utama dalam menciptakan konektivitas antar pulau-pulau agar mensejahterakan masyarakat ialah dengan peningkatan kepada intensitas dan kualitas layanan. Dengan menurunkan biaya transportasi murah dapat dijangkau oleh pelaku perjalanan. Dalam memudahkan mobilitas dan terjangkau biaya transportasi akan berdampak kepada mudahnya proses produksi sehingga harga barang produksi lebih kompetitif dan akhirnya daya beli masyarakat meningkat. Apabila daya beli masyarakat meningkat secara dengan sendirinya para investor akan tertarik dalam bekerjasama terkait

melaksanakan proses bisnis dengan tingginya peluang usaha sehingga berdampak terhadap peluang kerja. Apabila peluang kerja meningkat maka akan berdampak terhadap pengembangan kegiatan lainnya seperti industri, Pertanian, kebutuhan perumahan dan juga kegiatan lainnya termasuk di sektor kemaritiman serta kegiatan usaha kecil dan menengah (Guineensis et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarundajang pada tahun 2005, pengimplementasian terkait UU No. 32 Tahun 2004 membutuhkan kewaspadaan terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah seiring dengan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Paradigma terkini dari pengelolaan pemerintahan lahir seiring dengan era reformasi, yaitu demokratisasi. Pengelolaan sistem pemerintahan daerah melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik (Sarundajang, 2005)

Berdasarkan UU diatas terdapat masyarakat sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan, dari hal tersebut dikeluarkanlah UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai acuan utama dalam memberikan layanan publik dibuat oleh Pemerintah Pusat. Terkait Undang-Undang tersebut, tidak hanya membahas tentang pelayanan publik saja tetapi menjelaskan aktor perumusan layanan publik yaitu peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 39, dimana dideskripsikan bahwasanya peran serta masyarakat terkait pelayanan publik diawali pada penyusunan standar pelayanan hingga pada evaluasi dan pemberian penghargaan, dengan demikian

masyarakat juga sebagai aktor yang memiliki peran serta dalam pemberian pelayanan publik, hal tersebut diwujudkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat sebagai aktor aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, serta dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah untuk kesejahteraan (Pemerintah RI, 2009).

### KESIMPULAN

Sedikitnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi seperti kapal reguler, ketersediaan tambatan/dermaga, mercu suar dalam rangka untuk keselamatan pelayaran, listrik, air bersih dan lain lain. Dalam meningkatkan konektivitas antar pulau kecil di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan tentunya diperlukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan kapal perintis dan pelabuhan merupakan kunci utama yang penting dalam konektivitas antar pulau-pulau di Kecamatan Tambelan serta sarana dan prasarana maupun pendistribusian barang dan orang akan mengarah ke lebih baik. Mengacu kepada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat kebijakan terkait konektivitas Antar Pulau Melalui Transportasi Laut di Tambelan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan hal tersebut ialah memperkenalkan wilayah kecamatan Tambelan kepada para investor. Dengan kondisi geografis Tambelan dan sumber daya laut yang beragam seperti perikanan dan budidaya terumbu karang yang cukup luas. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih dari situlah pemerintah kabupaten bintan membuat kebijakan meningkatkan transportasi laut antar pulau di Tambelan melalui para investor. Akan tetapi

dalam proses perumusan pembuatan kebijakan tersebut, dibutuhkan pula aktor partisipasi masyarakat yang memiliki peran dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah.

## REFERENSI

### Journal:

Himawan, T., & Susanto, R. (2014). TERPENCIL DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU THE SEA TRANSPORT NEEDS WHICH CONNECTING REMOTE ISLANDS IN THE PROVINCE KEPULAUAN RIAU. 287–298

Rusfiana, Y. (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim ( Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ). Langsung: Jurnal Pendidikan Dan Sosial, 9(1), 1–9.

Saundajang, S. H. (2005). Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Kasta Hasta.

Sinaga, M., Mamahit, D. A., & Yusnaldi. (2020). Maritim infrastructure development. Pembangunan Infrastruktur Maritim Untuk Mendukung Program Tol Laut Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Volume 6 N(Maritim infratsructire development), 16.

Syafril KA, S. K., & Sujarwanto, S. (2020). Pengembangan Pelayaran Perintis pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir di Kepulauan Riau. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 17(2), 43–53. <https://doi.org/10.25104/transla.v17i2.1>

[411](#)

Yunnisa Tessy. (2022). 1669-Article Text-4288-2-10-20220601. Dampak Implementasi Kebijakan Ppkm Bagi Supir Angkutan Kota Trayek Cicaheum-Cileunyi Kota Bandung , 11(1).

### Aturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Transportasi Laut, (2008).

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayaran Publik, Pub. L. No. 25 (2009)

### Wawancara

Putri, Roha 2023. Tambelan, 18 Mei 2023.